

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MISKIN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
(Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Mu'amalah



Oleh:

ULYA QORINA
2102010

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MISKIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus” ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Sholawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pemikiran kepada berjuta-juta umatnya, sehingga pada saat ini penulispun bisa ikut menikmati hasil perjuangan beliau yang sangat agung itu.

Meskipun demikian, penulis sadar bahwa dalam batas-batas kewajaran masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberi saran serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini karena melalui petunjuk dan bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bp. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan sebagai dosen pembimbing I
2. Bp. H. Tolkhah M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan pikiran serta waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen beserta staff civitas akademika fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moch. Nasruddin selaku kepala desa Kauman Kudus
5. Bapak dan Ibu tercinta atas doa restu serta limpahan kasih sayangnya.

6. Kakakku tersayang, terima kasih atas segala masukan dan dukungannya selama ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis tetap berdoa dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin..

Semarang, 24 Januari 2007

Penulis,

ULYA QORINA

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang diperoleh dari pihak terkait dan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2007

Deklarator,

Ulya Qorina
NIM 2102010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KRITERIA MISKIN DALAM ISLAM DAN INPRES NO. 12/2005	
A. Pengertian orang miskin	13
B. Kriteria miskin menurut Islam dan Inpres No. 12 Tahun 2005	20
1. Kriteria Miskin Menurut Islam	20
2. Kriteria Miskin Menurut Inpres No. 12 Tahun 2005	22
C. Hak-hak Orang Miskin	23
D. Standar Taraf Hidup Layak	28
E. Sebab-sebab Kemiskinan	30
F. Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan	33

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KAUMAN KUDUS

A. Profil Desa Kauman Kudus	37
1. Keadaan Geografis.....	37
2. Jumlah Potensi SDM	38
3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Keagamaan	38
4. Pendidikan Masyarakat	40
B. Ketentuan-ketentuan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)	41
C. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman	49
D. Tanggapan Masyarakat Desa Kauman Tentang Bantuan Langsung Tunai	57

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MISKIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kauman Kudus	60
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kauman Kudus	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	75
C. Penutup	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam, itupun saling terkait satu dengan lainnya.¹

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dan 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Upaya lain peningkatan kesejahteraan adalah melalui peningkatan akses pada pemeliharaan kesehatan dan pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun. Keduanya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitatif penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Sasaran pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertinggal adalah peningkatan dan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diberikan pada desa-desa

¹ Suparmono, S.E. M.Si., *Pengantar Ekonomika Makro*, edisi 1 Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004 hal. 175.

tertinggal untuk memperbaiki dan membangun irigasi, jalan umum dan prasarana air bersih.

Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan ke depan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk. Kenaikan harga BBM disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari. Sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sebagai kompensasi terhadap kenaikan barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 dan yang mungkin akan dilakukan kembali pada waktu mendatang, pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada tahun anggaran 2005 meliputi: bantuan/subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan infrastruktur pedesaan termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah diluncurkan.

Khusus pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang

dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005.²

Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mensinyalir tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an surat Al-Hadid (57): 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar".*³

Statement ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai keharusan menafkahkan sebagian untuk orang-orang miskin, menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan. Ketentuan ini dipertegas dalam ketetapan hukum syar'i yang menjadikan keharusan mengeluarkan zakat. Firman Allah surat Adz-Dzariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

² Distribusi kartu kompensasi BBM, http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres%202005/ip%2012-2005.

³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, Semarang: CV. Toha Puyra, Hal 907

Artinya: *"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang yang miskin tidak mendapatkan bagian"*.⁴

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah penghidupan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, jika seorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial. Hal ini sering dipraktekkan oleh Nabi dan para Khalifah.⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Study Kasus di Desa Kauman Kudus".

B. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang di atas maka penulis memutuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana kriteria miskin menurut hukum Islam dan Inpres no. 12/2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995, hal 900.

⁵ Muhammad Ridwan Mas'ud, MSi., *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press 2005, hal. 82.

miskin?

2. Bagaimana pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai pada rumah tangga miskin di desa Kauman Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kriteria miskin menurut hukum Islam dan Inpres no. 12/2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin.
2. Untuk mengetahui cara pendistribusian Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan di Desa Kauman Kudus.

D. Telaah Pustaka

Masalah kemiskinan dan problematika ekonomi secara umum telah merusak akal dan jiwa manusia secara luas. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (adalah bentuk uang) berdasarkan harga pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia.

Fungsi dari pada adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan apakah masalah yang akan dibahas sudah ada yang membahas atau belum, serta agar terhindar dari pengulangan kajian dengan obyek dan perspektif yang sama dari yang sudah ada, dan sebagai bahan masukan untuk

permasalahan yang akan penulis kaji. Dalam masalah ini, sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara eksplisit. Akan tetapi penulis hanya temukan dalam masalah kemiskinan dan problematika ekonomi secara umum. Sedangkan permasalahan yang akan penulis kaji mengenai penentuan atau kategori keluarga miskin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari pada penelaah terhadap buku-buku maupun karya sarjana lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Oleh karena itu, penulis akan menelaah beberapa karya ilmiah, diantaranya yaitu:

Buku yang berjudul "*Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*" karangan Ridwan Mas'ud, M.Si dan Muhammad, M.Ag. didalamnya dibahas mengenai zakat dan penanggulangan kemiskinan yang diuraikan dalam sub bab kemiskinan, perspektif ekonomi Islam. Berkaitan dengan problem tersebut, bab ini akan membahas definisi kemiskinan, substansinya kemiskinan dan permasalahannya, serta pembahasan mengenai tujuan ekonomi Islam dan sistem-sistem ekonomi lainnya tentang kemiskinan.

Di Indonesia masalah kemiskinan telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitik beratkan tanggung jawab negara atas kelayakan kehidupan warganya. Konsekuensi pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengentasan kemiskinan, walau upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan, bahwa kemiskinan tetap saja hidup bersama bangsa kita.

"*Doktrin ekonomi Islam jilid I seri ekonomi Islam No. 3*" karya Afdzalur Rahman menjelaskan tentang tanggung jawab negara pada setiap warga negaranya dan setiap negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab ulama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup" dan terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

Tanggung jawab negara Indonesia terhadap kaum lemah telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga BBM.

Buku "*orang miskin tanpa subsidi*" karangan Eko Prasetyo, buku ini menceritakan kaum miskin yang makin kehilangan hak-haknya, hak-hak mereka dirampas pembangunan yang tunduk pada pasar, semakin tak mungkin bagi orang miskin untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai dan pekerjaan yang layak, yang semuanya itu penting bagi keadilan rakyat khususnya kaum miskin.

Buku karangan Dr. Yusuf Qardhawi yang mengkaji tentang keampuhan zakat untuk mengurangi kemiskinan adalah "*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*". Fokus pembahasan buku ini adalah bagian khusus sistem ekonomi Islam. Bagian ini berkaitan dengan kemiskinan, cara pemecahannya, pemeliharaan hak-hak kaum miskin, pemenuhan kebutuhan

mereka dan pemeliharaan kehormatannya dalam masyarakat dengan syari'at Islam. Buku ini juga memaparkan pandangan Islam tentang kemiskinan, cara menanggulangnya dan berbagai sarana yang dapat digunakan. Islam menjaga dan menjamin hak-hak serta kebutuhan kaum fakir dan miskin, baik rohani maupun materi.

Buku "*Pengantar Ekonomika Makro*" yang dikarang oleh Suparmono, SE., M.Si, yang didalamnya membahas tentang pengangguran dan kemiskinan. Didalamnya juga, menjelaskan tentang konsep dasar kemiskinan, penyebab kemiskinan dan ukuran kemiskinan.

Disamping berbagai buku-buku di atas sebagai penyusunan skripsi, penulis juga mengambil data dari kantor desa Kauman sebagai bahan kelengkapan untuk profil desa Kauman berupa dokumen-dokumen, yang merupakan data daftar potensi dan profil desa Kauman. Selain itu penulis juga mengambil data dari internet yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Buku ini memuat panduan umum yang mengatur tata cara pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB).

Karya-karya yang telah penulis paparkan diatas akan berbeda dengan skripsi yang akan penulis kaji, yang berjudul "***Analisis Hukum Islam Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Study Kasus di Desa Kauman Kudus***". Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji dari bagaimana pendistribusian Bantuan Langsung Tunai dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin yang

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dengan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa Kauman Kudus.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari.⁶

Data ini diperoleh dengan menggunakan:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang dilakukan langsung kepada

⁶ Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hal. 16

objek untuk mendapatkan respon secara langsung.⁷ Dimana interaksi yang terjadi antara pewawancara dan objek penelitian ini menggunakan *interview* bentuk terbuka sehingga dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam.⁸

Metode ini penulis gunakan dalam melaksanakan wawancara dengan kepala desa Kauman Kudus.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji yang berupa catatan, notulen rapat, dan lain sebagainya metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di kantor desa Kauman Kudus. Pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Dalam daftar rumah tangga miskin yang memperolehnya dan laporan lainnya.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.⁹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya dan buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data ini diperoleh dengan menggunakan:

⁷ Lexy, Moleong, *Metode kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet14, 2001, hal 3

⁸ Ibid, hal 137

⁹ Syaifudin Ajwar, *op. cit.*

Dokumentasi literatur

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, agenda, internet dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.¹⁰

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹¹ Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada proses pelaksanaan bantuan langsung tunai yang diadakan di desa Kauman Kudus. Analisis ini akan digunakan pada bab IV.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi dan tersusun rapi serta terarah.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet Ke 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 236.

¹¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1996, hal. 190.

Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : HAK-HAK ORANG MISKIN DALAM ISLAM

Yang berisikan tentang pengertian dan kriteria orang miskin, hak-hak orang miskin, standar taraf hidup layak, sebab-sebab kemiskinan, sarana untuk menghapus kemiskinan.

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KAUMAN MENARA KUDUS.

Yang berisikan sekilas tentang profil desa Kauman Menara Kudus, ketentuan-ketentuan tentang Bantuan Langsung Tunai, pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di desa Kauman Menara Kudus.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MISKIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA KAUMAN MENARA KUDUS.

Yang berisikan tentang analisis terhadap kriteria miskin dalam melaksanakan Bantuan Langsung Tunai, analisis terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

**KRITERIA MISKIN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT)
(Study Kasus di Desa Kauman Kudus)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Ulya Qorina
2102010

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

BAB II

KRITERIA MISKIN DALAM ISLAM DAN INPRES NO. 12 TAHUN 2005

A. Pengertian Orang Miskin

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang kata *masakin* ialah bentuk jama' dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'ah*.¹

Menurut al-Fairuz Abadi dalam *Al-Qamus* "miskin" adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya.² Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.³

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridwan Mas'ud dalam bukunya *zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umat* lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁴

Para ulama-ulama baik sahabat atau *tabi'in* berbeda pendapat dalam

¹ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, Cet2, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1985, hal. 134

² Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hal. 166

³ Sidi Gazalba, *Op. Cit* hal. 135

⁴ Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press, 2005, hal. 55.

memahami dan menafsirkan lafadh *al-masakin* dalam surat At-Taubah 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁵

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan.⁶

Ibnu Jarir dalam tafsirnya *Jami'ul Bayan* menerangkan bahwa, menurut Hasan *al-miskin* adalah orang yang berusaha,⁷ Ibnu Abbas menyatakan lain kata *al-masakin* diartikan orang yang keluar rumah untuk meminta-minta.⁸ Hal serupa juga diungkapkan oleh Mujahid, lebih lanjut ia menyatakan bahwa *al-masakin* adalah orang yang meminta. Ibnu Zaid dalam menafsirkan *al-masakin* diartikan orang-orang yang meminta-minta pada orang lain. Menurut Qatadah *masakin* adalah orang yang sehat (orang yang tidak mempunyai penyakit) yang membutuhkan.⁹

Pada riwayat lain disebutkan bahwa Umar menyatakan "bukanlah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Semarang, CV. Toha Putra, 1995, hal. 288

⁶ Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, hal. 295

⁷ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan 'antanwil ay Al-Qur'an*, Jilid 6, Darul Fikr, 1995, hal. 205.

⁸ *Ibid.*, hal. 203.

⁹ *Ibid.*, hal. 204.

orang miskin yang tidak mempunyai harta sama sekali, tetapi orang yang buruk raganya" sementara Ikrimah menyatakan orang-orang ahli kitab.¹⁰

Pengertian miskin sering disamakan dengan fakir. Penjelasanannya ialah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

1. Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik dari pada orang miskin.¹¹ Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah surat Al-Balad:16

...أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: "Atau kepada orang miskin yang melarat."¹²

Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹³ Dengan kata lain orang miskin lebih parah kondisinya daripada fakir.¹⁴

2. Menurut Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian. Dengan demikian, keadaan orang miskin

¹⁰ *Ibid.*, hal. 205.

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 95

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 1062.

¹³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 96.

¹⁴ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal. 241.

lebih baik dari pada orang fakir.¹⁵ ini diperkuat dengan firman Allah surat Al-Baqarah 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".¹⁶

3. Ibnu Al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.¹⁷

Menurut Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.¹⁸

Pemuka ahli tafsir Thobari, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata

¹⁵ M. Ali Hasan, *Ibid*.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 68.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 96.

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung, Mizan, 2005, hal. 115

maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian.

Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرثان ... ولكن المسكين الذي يتعفف

Artinya: "yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah, dua buah kurma, tapi orang miskin itu orang yang meminta-minta".

Dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits itu menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedang yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.¹⁹

Dalam pengertian lain kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak sejahteraan, dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya. Namun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti Al-qur'an menyebut setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin dan harus dibantu. Oleh karena itu pengertian miskin tergantung kepada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan, misalnya) selalu berubah-ubah.²⁰

Sedangkan dalam kategori fiqh, orang yang menerima zakat terdiri dari

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : Lintera Antarnusa, cet 6 2002, hal. 513

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, cet 7 1998, hal 449

8 golongan sebagaimana diisyaratkan pada surat yang terbagi dalam dua kategori yaitu; 1) empat utama 2) sewaktu-waktu. Empat penerima zakat yang utama, salah satunya adalah orang miskin. Miskin orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun) yang memiliki alat produksi tapi masih kekurangan modal (di bawah nisab) dengan pendapatan masih tergolong miskin. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW ada tiga klasifikasi miskin yaitu :

1. Seseorang yang tidak mempunyai suatu nisab
2. Orang yang tidak mempunyai pendapatan 50 dirham pertahun (dibawah Rp. 12.000.000,- pertahun)
3. Seseorang yang tidak mempunyai makanan sehari semalam yang jika diukur berdasarkan klasifikasi tersebut menurut Sayogyo seperti dikutip dari Sahri Muhammad sbb:

Table I

Kriteria Miskin Dari Tingkat Konsumsi Makanan Pokok ²¹

NO	Kriteria	Tingkat Konsumsi Beras		Nilai Rupiah (Rp. 2.220,-/kg)
		Perkapita Pedesaan	Pertahun Perkotaan	
1	Miskin	320 kg	480 kg	704.000 – 1.056.000
2	Cukup miskin	240 kg	360 kg	528.000 – 792.000
3	Miskin sekali	180 kg	270 kg	396.000 – 594.000

Mauloud Kassim Nait-bel Karem menyebutkan, yang dimaksud dengan *masakin* adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain karena persediaannya tidak cukup dimakan selama satu tahun.²²

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok

²¹ Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hal 35

²² H. Moh. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal 278-279

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental atau fisiknya dalam kelompok tersebut. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang sandang, pangan, papan tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada.²³

Al-Nawawi dalam Raudhah menegaskan:

المسكين هو الذى يملك مايقع موقعاً من كفايته ويكفيه, بان احتاج الى عشرة وعنده سبعة او ثمانية

"Miskin adalah orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi, seperti orang yang butuh 10 tapi ia hanya memiliki 7 atau 8".

Miskin dalam maknanya adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi. Sama juga harta yang dimiliki itu telah sampai satu nishab, atau kurang lebih dari satu nishab.²⁴

Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat 3 faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang: *pertama*, harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat (*maal mamluk hadhir*). *Kedua*, mata pencaharian (pekerjaan) tetap, yang dibenarkan oleh hukum (*al kasb halal*). *Ketiga*, kecukupan (*al-kifayah*) akan kebutuhan hidup yang pokok atas landasan faktor-faktor tersebut. Dirumuskan bahwa, si miskin ialah barangsiapa yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, hal mana salah satunya (harta/mata pencaharian/keduanya), hanya menutupi tidak lebih

²³ Suryono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 366

²⁴ Al-Syekh Muhyidin Abu Zakaria ben Syaraf al-Nawawi, *Raudhah Thalibm*, Majmu' Syarh, al-Muhadzdzab, Juz VI, dari Fikr, hal., 173.

dari kebutuhan pokoknya.²⁵

Para fuqaha berbeda pendapat tentang pengertian fakir dan miskin, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah, yang dimaksud fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan tetapi ia tidak mau mengemis sedangkan miskin pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis pada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.²⁶

B. Kriteria Miskin Menurut Islam dan Inpres No. 12 Tahun 2005

1) Kriteria miskin menurut Islam

Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolok ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan pada

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 163.

²⁶ Drs. Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, hal. 115.

orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda yang dipotong dalam hitungan setahun, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu.

Dalam zakat terdapat ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan itu wajib dizakati jika dalam setahun sudah memenuhi nishab. Nishab untuk zakat *maal* adalah pendapatan atau kekayaan setara 89 gr emas setahun. Jika harga emas 24 karat itu Rp. 24.650/gr maka nilai 89 gr emas murni adalah Rp. 2.293.850 setahun. Inilah garis batas dalam kriteria pendapatan antara yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang cukup dan wajib berzakat. Zakatnya adalah 2 1/2 % yang berarti Rp. 54.846 pertahun. Jika pendapatannya Rp. 182.821 perbulan, maka zakatnya Rp. 4.571 perbulan.²⁷

Sajogyo menjadikan perolehan beras bagi setiap penduduk menjadi takaran dengan batas minimum 20 kg per orang perbulan bagi yang tinggal di pedesaan. Sedangkan yang menetap di daerah perkotaan batas minimum 30 kg per orang perbulannya. Kalau sudah memperoleh ketentuan dan melebihi 20 kg bagi yang berdomisili di desa dan 30 kg yang berdomisili di perkotaan maka dikategorikan tidak lagi miskin.²⁸

Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (dalam bentuk uang) berdasarkan hanya pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok

²⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 444.

²⁸ Muh. Ridwan Mas'ud, *Op. Cit.*, hal. 71.

merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia.

2) Kriteria miskin menurut Inpres No. 12 Tahun 2005

Sedangkan kriteria atau ciri-ciri rumah tangga miskin yang berhak mendapat dana kompensasi BBM menurut Instruksi Presiden RI no12 th 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama dengan orang lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu –dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah./tidak

tamat SD/ sampai SD

13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan/ pekerjaan lainnya di bawah Rp 600.000 per bulan
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor/ barang modal lainnya.²⁹

C. Hak-Hak Orang Miskin

Bahwa sesungguhnya hak fakir-miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang-orang miskin meskipun yang diam-diam saja.

Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar di tangan kelompok kaya saja. Dan bahwa orang-orang yang bertaqwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir dan miskin.³⁰ Seperti dalam firman Allah surat Adz-Zariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*³¹

²⁹ Distribusi kartu kompensasi BBM, http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres%202005/ip%2012-2005.

³⁰ Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 64.

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 900.

Islam mengambil langkah-langkah untuk menjamin kondisi serta kebutuhan masyarakat dengan adanya distribusi yang merata terhadap harta, tidak terjadi perampasan hak. Begitu pula tak seorangpun diperbolehkan menumpuk hartanya secara berlebihan, sekaligus tak seorang pun dibiarkan kelaparan.

Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin dan kaum papa. Pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin, karena tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan.³² Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.³³

Ibnu Hazm berkata: Allah mewajibkan semua orang yang mampu dari tiap-tiap negara agar menunaikan kewajibannya terhadap orang miskin. Dalam hal ini pemerintah bisa memaksa kalau mereka memang tidak menunaikan kewajiban itu dengan baik. Jika uang zakat dan hasil rampasan perang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kaum muslimin, maka negara berhak menindas orang-orang yang mampu agar mereka memenuhi hajat primer masyarakat baik berupa sandang, pangan, dan perumahan.³⁴

Salah satu tujuan zakat adalah mencoba mengurangi perbedaan dan kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, sehingga yang kaya

³² Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 87.

³³ Moh. Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 249.

³⁴ Moh. Sanad at-Tukhi, *Ibadah Muamalah: Dalam Tinjauan Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal. 6-7.

tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Mengenai hal ini pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang miskin. Dengan alasan di atas, Islam sangat membela fakir-miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir-miskin.

Disamping zakat, orang miskin juga mempunyai hak dalam kesejahteraan yang meliputi keamanan dan keselamatan hidup. Perkataan kesejahteraan merupakan pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhannya dengan tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Diantara asas-asas untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak untuk mendapat keadilan.

Hak seseorang atau masyarakat untuk mendapatkan keadilan antara lain adalah:

1. Hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum
2. Hak untuk membela dan mempertahankan diri terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
3. Hak untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat pada umumnya.
4. Hak untuk tidak mematuhi segala perintah dan larangan yang bertentangan dengan hukum tanpa mempersoalkan siapa yang memerintahnya.³⁵

³⁵ Moh. Daud Ali, *Loc. Cit.*, hal. 276.

Disamping hak untuk mendapatkan keadilan, asas lain yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kebebasan memilih agama dan beribadah menurut keyakinan agama yang dipilih. Asas ini disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Qur'an surat Al Baqarah: 256 yang artinya "*Tidak ada paksaan dalam agama...*". Dalam pernyataan hak-hak asasi manusia menurut ajaran Islam disebutkan secara rinci beberapa hal lain yang merupakan syarat esensial, untuk menegakkan kesejahteraan manusia dalam masyarakat diantaranya adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak untuk memperoleh makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan (kesehatan) bagi setiap orang. Hak-hak tersebut dirangkum dalam istilah jaminan sosial, terutama bagi yang miskin.³⁶

Hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara bertalian dengan upaya masyarakat dan pemerintah untuk memperluas lapangan kerja. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang. Penghasilan itu digunakan untuk ketentuan dirinya sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu, orang miskin juga berhak mendapatkan pekerjaan. Bahwasanya seseorang yang mempunyai pekerjaan makin tumbuh dan berkembang harga dirinya, dan sebaliknya seseorang akan merosot harga dirinya apabila tidak bekerja.³⁷

Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat sepanjang dana yang tersedia dapat mencukupi. Negara bukan saja mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat kecil saja, akan tetapi bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok seluruh masyarakat.

³⁶ *Ibid.*, hal. 277.

³⁷ Moh. Tolkhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Perss, Cet ke3, 2005, hal. 160

Dan Ibnu Hazm menjelaskan kebutuhan pokok hidup bagi seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Ia harus memiliki cukup makan untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat.
- 2) Ia harus mempunyai pakaian yang layak untuk berlindung dari kedinginan dan kepanasan
- 3) Ia harus mempunyai tempat tinggal yang baik untuk melindungi dirinya dari iklim yang kurang baik dan untuk bisa hidup mandiri.³⁸

Kebutuhan pokok ini, termasuk salah satu dari hak-hak manusia dalam Islam. Bila ia tidak mampu memperolehnya dengan usaha ketrampilan dan penghasilannya karena suatu sebab, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakan. Bila tidak cukup dana untuk memenuhi kebutuhan itu, maka negara dapat memungut pajak dari orang-orang kaya. Sebab apabila dalam suatu hari seseorang dibiarkan dalam keadaan lapar atau tidak berpakaian, atau tidak bertempat tinggal maka seluruh masyarakat akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah.³⁹

Disamping hak-hak fakir miskin menurut Islam diatas, disebutkan juga hak fakir miskin yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 34 UUD '45 menyatakan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" yang dimaksud dengan fakir miskin disini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang

³⁸ *Ibid.*, hal. 134.

³⁹ *Ibid.*, hal. 158.

layak bagi kemanusiaan, seperti para gelandangan, pengemis, anak jalanan.

2. Pasal 1 UU No. 6 tahun 1974 "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya".
3. Pasal 2 PP RI No. 42 tahun 1981 "Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan rehabilitasi sosial" ⁴⁰

D. Standar Taraf Hidup Layak

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat ditafsirkan, bahwa kebutuhan yang mutlak bagi setiap orang adalah makanan yang cukup, dalam arti cukup kalori dan cukup gizi. Dalam perkembangannya dia berusaha mencukupi kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.⁴¹

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ulama Hanafi memberi tafsiran ilmiah tentang apa yang dimaksud kebutuhan rutin yaitu suatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari, tempat tinggal untuk mempertahankan diri, pakaian yang digunakan untuk melindungi dari panas dan dingin atau yang termasuk kebutuhan primer seperti hutang, karena orang yang berhutang wajib membayar hutangnya dengan segala sesuatu yang dimiliki untuk melepaskan diri dari keterikatan yang merupakan kehancuran dan kebodohan, karena kebodohan menurut mereka sama dengan kehancuran. Oleh karena itu apabila ada orang yang memiliki sejumlah uang namun tidak

⁴⁰ *Kesejahteraan Sosial : Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara*, [www/transparansi-or.id/kajian/k.sosial-01.htm](http://www.transparansi-or.id/kajian/k.sosial-01.htm)

⁴¹ Moh. Tolkhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantarabora Pres, Cet ke3, 2005, hal. 160

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diatas, maka ia berarti tidak punya apa-apa.⁴²

Menurut al-Kasani kaya itu ada 3 (tiga):

- a. Kaya yang menyebabkan kewajiban zakat.

Orang yang memiliki 1 nishab dari harta berkembang yang lebih dari kebutuhan dasarnya.

- b. Kaya yang haram menerima zakat dan sedekah tetapi tidak wajib membayar zakat.

Orang yang berkewajiban zakat fitrah dan berqurban yakni orang yang punya harta yang tidak wajib dizakati yang lebih dari kebutuhannya, serta nilainya sampai 200 dirham, berupa pakaian, kuda, rumah, dan kendaraan, pembantu yang dipakai dan digunakan sehari-hari bukan untuk perniagaan.

- c. Kaya yang haram meminta-minta dan tidak haram mengambil zakat.

Orang yang mempunyai bekal untuk satu harinya.⁴³

Al-Syathibi mengatakan bahwa kepentingan atau kebutuhan hidup manusia itu dibagi menjadi tiga kategori:

1. Prioritas pertama: *Ad-Dhoruriyat*

Ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan minimum.

2. Prioritas kedua: *Al- Hajiyyat*

Ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan

⁴² Drs. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Litera Antarnusa, cet. 7, Jakarta, 2004.

⁴³ *Ibid.*, hal. 71-73.

penerangan, pendidikan dan lain sebagainya.

3. Prioritas ketiga: *At- Tahsinat*

Atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dari pada kebutuhan hidup.⁴⁴

E. Sebab-Sebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam satu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bambang Ismawan memaparkan beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain:

1. Kurangnya pengembangan SDM

Menurut data BPS memperlihatkan bahwa 72,0% dari rumah tangga miskin di pedesaan dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD, begitu juga dengan masyarakat perkotaan. 57,0% rumah tangga miskin di perkotaan dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan 31,4% yang berpendidikan SD. Menurut Syafaruddin Alwi, bahwa tingkat pendidikan yang rendah tidak memiliki nilai jual yang tinggi sehingga jasa yang dijual harganya pun akan rendah.

2. Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin

Ketidakberuntungan ini disebut oleh Robert Chambers seorang ahli pembangunan pedesaan, merupakan jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu sendiri kelemahan fisik, keterasingan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang lebih kuat.

⁴⁴ Moh. Tolkhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Pres, Cet ke3, 2005 hal. 160

3. Ketimpangan distribusi

Hal ini dapat terjadi karena produksi yang dimiliki, pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga otot akan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual dalam berproduksi.⁴⁵

Yohanes Mardimin, mengatakan sumber utama penyebab terjadinya hal yang bisa menimbulkan terjadinya kemiskinan adalah ketidakadilan. Selanjutnya ia berpendapat ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kemiskinan yaitu:

1. Karena orang tinggal di suatu tempat yang sangat miskin
2. Karena orang menempuh gaya hidup yang membawa kepada kemiskinan.
3. Karena orang lain menganut kepercayaan yang menganggap kekayaan sebagai salah satu sumber dasar.

Adapun faktor penyebab kemiskinan dari sudut pandang konservatif adalah dari orang miskin itu sendiri, mereka yang miskin dinilai malas, tidak punya keinginan untuk maju, kurang trampil dalam kebudayaan yang anti kemajuan.⁴⁶

Kemiskinan bisa juga disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri misalnya lemah fisik, takut dalam mencapai kesuksesan, kepelitan dari orang-orang kaya, tertindih hutang, diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan

⁴⁵ Muh. Ridwan Mas'ud, *loc.cit.*, hal. 74.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 76.

kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun tingkat masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁷

Ahli ekonomi Sharp, et. All. (1990: h. 173-191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapat yang timpang, *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *Ketiga*, penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.⁴⁸

Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya problema kemiskinan adalah karena adanya kepincangan di bidang ekonomi pada salah satu lembaga kemasyarakatan, hingga akhirnya kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lain, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan.⁴⁹

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kemiskinan kultural

Merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur,

⁴⁷ Ali Yafie, *Op. Cit.*, hal. 172.

⁴⁸ Mudrajat Kuncoro, M.Soc, sc, *Ekonomi Pembangunan Teori*, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, cet. II, 2000, hal. 106-107.

⁴⁹ Suryono Soekanto, *Loc. Cit* hal. 14

budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.

b. Kemiskinan Struktural

Yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan, seperti tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.⁵⁰

F. Sarana Untuk Menghapus Kemiskinan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada beberapa jalan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan. Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa cara, diantaranya:

1) Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar dimuka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT.⁵¹ Firman Allah surat Al-Mulk

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Al-Mulk: 15)*⁵²

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang

⁵⁰ Suparmono, SE, MSi, *Pengantar Ekonomika Makro*, edisi I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004, hal. 175.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 51.

⁵² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 956.

ditekankan oleh kitab suci Al-qur'an. Karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dengan demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan.⁵³

2) Bantuan keluarga atau kerabat dekat

Upaya ini dapat ditempuh melalui lembaga infak, sedekah dan amal jariyah lainnya. Selain itu juga dapat dilaksanakan melalui lembaga kewarisan menurut ajaran Islam. Islam menekankan agar setiap orang memberikan hak karib kerabat dan mendorong untuk memperkokoh ikatan dan berbuat baik terhadap mereka.⁵⁴ Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an seperti Qur'an surat Ar-Rum ayat 38.

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir-miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah...(QS. Ar-Rum ayat 38)".⁵⁵

Para fuqaha menyebutkan bahwa nafkah yang diberikan oleh kerabatnya mencakup makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, pembantu bagi mereka yang tidak dapat melayani, mengawinkan bagi yang tidak mampu kawin, nafkah istri dan anaknya, perawatan kesehatan, pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan.⁵⁶

3) Zakat

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Bandung,: Mizan, 1998, hal. 453

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 72

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 647.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 84.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya, untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.⁵⁷

4) Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya

Baitul Mal merupakan tempat penampungan dana yang bersifat umum dan menyediakan itu untuk kepentingan umum dari masyarakat. Harta baitul mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewa sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum.

Jika baitul mal tidak bisa menutupi kebutuhan kaum miskin, sementara anggota masyarakat tidak segera membantu mereka, maka aparat pemerintah di sebuah negara Islam harap segera bertindak. Bahkan mereka diharuskan memaksa orang-orang kaya untuk merelakan sebagian hartanya untuk menutupi kebutuhan primer kaum miskin.⁵⁸

5) Bantuan Sosial

Bantuan negara untuk memecahkan (mengentaskan) masalah kemiskinan dengan berwujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah memberikan bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir-miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan

⁵⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam-Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal. 33.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, *Op. Cit.*, hal. 139.

sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif, sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut. Maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.⁵⁹

⁵⁹ *Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara*, [www/transparansi-or.id/kajian/k.sosial-01.htm](http://www.transparansi.or.id/kajian/k.sosial-01.htm)

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA KAUMAN KUDUS

A. Profil Desa Kauman Kudus

1. Keadaan Geografis Desa Kauman

Secara geografis desa Kauman terletak di kecamatan kota kabupaten Kudus, tepatnya di sekitar komplek makam Sunan Kudus dan Masjid Menara “Al-Masjidil Aqsha”. Kepala desa Kauman bernama Moch. Nasrudin. Desa Kauman terbagi menjadi satu rukun warga (RW) dan tiga rukun tetangga (RT). Penduduk desa Kauman semuanya beragama Islam.

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Kauman terletak pada 6°30'LS-7°00' dan 3°40'BT/BB – 20°10' BT/BB. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Kerjasan
Sebelah Selatan	: Desa Janggalan
Sebelah Timur	: Desa Langgar Dalem
Sebelah Barat	: Desa Damaran

b. Berdasarkan data monografi, luas tanah kering untuk pemukiman di desa Kauman seluas 290,97 ha dengan kondisi yang beraspal 0,5 km dan yang tidak beraspal 1,161 km.

2. Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif total penduduk desa Kauman berjumlah 464 orang. Penduduk laki-laki berjumlah 231 orang dan yang perempuan berjumlah 233 orang. Jumlah kepala keluarga 107 KK.¹

3. Keadaan Ekonomi dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Kauman

a. Pengangguran

- 1). Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 tahun) berjumlah 297 orang
- 2). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah berjumlah 102 orang.
- 3). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga berjumlah 37 orang.
- 4). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja penuh berjumlah 144 orang.
- 5). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak penuh berjumlah 14 orang.

b. Mata Pencarian

Pada umumnya penduduk Desa Kauman bermata pencarian pedagang atau wiraswasta. Karena wilayah desa Kauman dekat dengan obyek wisata yaitu Makan Sunan Kudus sehingga sebagian masyarakat desa Kauman bekerja dengan membuka usaha toko.

¹ Dikutip Dari Album Data Bhabinkamtibmas Desa Kauman Kec. Kota Kab. Kudus, Januari 2006

Mata pencaharian penduduk Desa Kauman bermacam-macam, yaitu:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Pedagang/wiraswasta/pengusaha | 65 orang |
| 2. Pengrajin | 8 orang |
| 3. Pegawai negeri Sipil | 12 orang |
| 4. Penjahit | 2 orang |
| 5. Karyawan swasta | 44 orang |
| 6. Guru swasta | 25 orang |

Keberagaman masyarakat desa Kauman cukup baik. Hal ini ditandai dengan suasana agamis yang tampak dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, disamping itu pengajian-pengajian rutin banyak dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain pengajian-pengajian tingkat desa, memperingati hari besar Islam dan sosialisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan penduduk desa Kauman, bisa dilihat dari sarana ibadah serta banyaknya organisasi keagamaan. Sebagaimana tercatat dalam papan monografi desa Kauman ada 6 majlis taklim dan 1 pondok pesantren. Adapun pengembangan yang dimaksud tidak lepas ditunjang sarana dan prasarana yang ada yaitu 1 masjid dan 1 tempat untuk kegiatan rutin.

4. Pendidikan Masyarakat

a. Tingkat pendidikan penduduk Desa Kauman

1) Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	76 orang
2) Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	85 orang
3) Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	88 orang
4) Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	141 orang
5) Jumlah penduduk tamat D1	1 orang
6) Jumlah penduduk tamat D2	3 orang
7) Jumlah penduduk tamat D3	2 orang
8) Jumlah penduduk tamat S1	25 orang
9) Jumlah penduduk tamat S2	3 orang

b. Wajib belajar 9 tahun

1) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	: 67 orang
2) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	: 67 orang
3) Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	: -

Lembaga pemerintahan di desa Kauman memiliki tiga orang aparat pemerintah desa yakni, kepala desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Sedangkan badan perwakilan desa (BPD) memiliki 9 anggota, yang cara penentuannya dipilih oleh masyarakat desa. Adat-istiadat yang biasa dilakukan di Desa Kauman adalah perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian, dan memecahkan konflik warga.

Prasarana yang ada di Desa Kauman meliputi prasarana air bersih dengan menggunakan sumur gali dan PAM, sarana pendidikan

hanya ada 1 SD/ sederajat dan sarana penerangan dengan menggunakan listrik PLN semua.²

B. Ketentuan-ketentuan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sejak pemerintah RI mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang dimulai tahun 2000, berbagai program kompensasinya telah dilakukan. Tahun 2005 program untuk itu adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). Sebelumnya, tahun 2000 ada dana kompensasi sosial kemudian berubah menjadi PPDP-SE (tahun 2001) dan PKPS BBM sejak tahun 2002.

Program PKPS BBM adalah upaya pemerintah untuk mengembalikan dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM kepada penduduk miskin yang diperkirakan terkena dampak langsung dari kenaikan BBM. Dana pengurangan subsidi tersebut dikembalikan dalam bentuk bantuan langsung kepada warga masyarakat yang tidak mampu atau miskin, seperti bantuan raskin, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Serta digunakan untuk pemberdayaan ekonomi negara dan menurunkan defisit anggaran pemerintah. termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah diluncurkan.

Tujuan pengurangan subsidi BBM itu adalah agar dapat dilanjutkan pembangunan nasional melalui penyehatan perekonomian negara, dengan tetap memberikan bantuan ataupun subsidi kepada masyarakat tidak mampu atau miskin. Hal tersebut karena selama ini subsidi harga BBM yang diberikan

² Dikutip Dari Daftar Isian Potensi dan Profil Desa Kauman Kudus, Tahun Anggaran 2006.

oleh pemerintah hampir seluruhnya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas atau golongan mampu. Sehingga sasaran dari program PKPS BBM adalah warga masyarakat yang terkena dampak pengurangan subsidi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air bersih, serta kesehatan dan pendidikan.³

Khusus pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 12 tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan rumah tangga miskin (sensus kemiskinan) pada tanggal 15 Agustus-15 September 2005 serentak di seluruh Indonesia. Dan pendataan yang dikemas dengan nama pendataan sosial ekonomi penduduk tahun 2005 (PSE05), bertujuan untuk memperoleh nama dan alamat rumah tangga miskin sebagai sasaran PKPS-BBM. Hasil pendataan ini juga merupakan data basis kemiskinan yang dapat dimanfaatkan untuk pelbagai keperluan yang berkaitan dengan upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

Kartu tanda pengenal rumah tangga miskin berdasarkan hasil rapat koordinasi PKPS-BBM tingkat menteri, diberi nama Kartu Kompensasi BBM disingkat KKB. Penerima KKB adalah rumah tangga hasil pendataan rumah tangga miskin, yang memenuhi persyaratan setelah melalui tahapan

³ Dikutip Dari Buletin Batang Berkembang, *SLT Subsidi Untuk Penduduk Miskin*, Edisi 20/th.x/2005, hal. 2.

pencocokan dan penelitian ulang yang secara nasional berjumlah sekitar 15,5 juta rumah tangga.⁴

Berdasarkan Departemen Komunikasi dan Informatika RI yang berhak menerima Subsidi Langsung Tunai (SLT) adalah:

1. Kelompok sangat miskin

Yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 1.900 kilo kalori perhari, yang senilai dengan Rp. 120.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 480.000 per rumah tangga per bulan).

2. Kelompok miskin

Yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2100 kilo kalori per hari, yang senilai dengan Rp. 150.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang perbulan (atau Rp. 600.000 per rumah tangga per bulan).

3. Kelompok hampir miskin

Yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2.300 kilo kalori per hari, yang senilai dengan Rp. 175.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 700.000 per rumah tangga per bulan).

Bantuan/Subsidi Langsung Tunai merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000,- per bulan. Untuk mempermudah

⁴ *Distribusi Kartu Kompensasi BBM*, http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres%202005/ip%2012-2005.

pengambilan BLT diberikan tiap tiga bulan. Sehingga sekali mengambil, masing-masing mendapat Rp. 300.000,-.

Organisasi pelaksanaan BLT secara berjenjang dari pusat ke propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Dengan memfasilitasi PT. Pos Indonesia untuk dapat membayarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka kompensasi pengulangan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin yang sesuai dengan hasil pendataan BPS.⁵

Mekanisme Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Untuk memastikan pendistribusian KKB secara tertib, lancar dan aman ditempuh dengan langkah-langkah berikut:

1. Penyiapan daftar nama rumah tangga miskin dan pencetakan KKB

BPS menyiapkan daftar nama rumah tangga miskin hasil PSE05 untuk diserahkan secara bertahap kepada PT. Pos Indonesia. Selanjutnya PT. Pos Indonesia mencetak KKB sesuai data yang diberikan BPS, dalam waktu yang bersamaan BPS menyerahkan daftar yang sama kepada BPS kabupaten/kota untuk bahan pengecekan ulang.

2. Pengirim KKB ke BPS kabupaten/kota

PT. Pos Indonesia mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

3. Pencocokan dan penelitian ulang penerimaan KKB

BPS kabupaten/kota membentuk tim pendistribusian KKB ditingkat kabupaten dan kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh bupati

⁵ Dikutip Dari Tim Koordinasi Pusat pelaksanaan Program SLT Kepada Rumah Tangga Miskin, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.

dan camat. Dengan menggunakan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang dikirim BPS Pusat. Tim melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima KKB. Dalam pencocokan dan penelitian ulang, empat hal bisa terjadi:

- a. Bagi rumah tangga yang nama, alamat serta kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, ditetapkan berhak mendapat KKB
- b. Bagi rumah tangga yang namanya salah secara total, dilakukan perbaikan data dan pencetakan ulang KKB.
- c. Bagi rumah tangga yang ternyata tidak layak disebut miskin, harus dicoret dari daftar nama (selanjutnya dibatalkan KKBnya).
- d. Apabila masih dijumpai di lapangan rumah tangga yang benar-benar layak disebut miskin, kepadanya masih dimungkinkan untuk didaftar dan informasinya disampaikan secara berjenjang ke BPS Pusat untuk perbaikan data dan pencetakan KKBnya oleh PT. Pos Indonesia.

4. Pendistribusian KKB

Setelah kegiatan pencocokan dan penelitian ulang, KKB yang telah diterima BPS kabupaten dari PT. Pos Indonesia di distribusikan kepada Mantri Statistik untuk kecamatan masing-masing. Selanjutnya Mantri Statistik bersama tim pendistribusian di tingkat kecamatan membagikan KKB ke kelurahan/desa difasilitasi oleh lurah/kepala desa.

Adapun mekanisme distribusi KKB adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga miskin yang telah dinyatakan valid dapat langsung menerima KKB dengan menandatangani *print out* daftar nama rumah tangga miskin yang telah dikirim oleh BPS Pusat.
- b. Rumah tangga miskin yang namanya masih keliru, baru akan dapat diberikan setelah KKB yang cetak ulang oleh PT. Pos Indonesia diterima BPS kabupaten atau Mantri Statistik bersangkutan.
- c. Rumah tangga yang tidak valid (tidak miskin), KKBnya dilarang keras untuk diberikan.
- d. Rumah tangga yang belum didaftar dan secara nyata benar-benar miskin, dapat diberikan KKBnya pada kesempatan berikutnya setelah KKB dicetak oleh PT. Pos Indonesia.⁶

Sejak BLT dikururkan bagi keluarga miskin, terdapat orang-orang yang tidak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan uang BLT itu. Secara sosiologis, diartikan keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai taraf hidup suatu kelompok dan tidak mampu memanfaatkan potensi fisik maupun mentalnya untuk memenuhi kebutuhan minimum.

Miskin akibat kemalasan bisa diatasi dengan mendorong gairah kerja, pelayanan yang mengarah pada program pengembangan, serta etos kerja yang melampauinya pola ekonomi subsistem. Tetapi BLT justru

⁶ Distribusi Kartu Kompensasi BBM, *op.cit.*,

menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin.⁷

Banyak pihak yang berpendapat bahwa Subsidi Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin bersifat *charity* dan dapat menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan pemerintah. Serta secara mikro menumbuhkan budaya konsumtif sesaat. Karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh pemerintah (*unconditional cash transfer*). pendapat tersebut patut kita hargai, karena menghadapi masyarakat miskin selayaknya tidak dengan program yang sifatnya *hit and run*, namun harus dengan program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimilikinya.⁸

Adanya PKPS-BBM ini, dirasakan banyak memberikan manfaat yang bisa didapat oleh pemkab dan masyarakat khususnya keluarga miskin. Di satu sisi pemkab merasa terbantu sekali karena dana yang masuk untuk penanggulangan kemiskinan banyak sekali. Sehingga dana kas daerah bisa digunakan untuk pembangunan lainnya, kemudian juga mendapatkan pengalaman penanganan kemiskinan. Dan disisi lain, masyarakat mendapatkan keinginan beban hidup dan kebutuhan infrastruktur terpenuhi.

⁷ Purnomo, *Dampak Psiko Sosial Bantuan Langsung Tunai*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/28/op101.html>.

⁸ *Peningkatan perlindungan dan Kesejahteraan sosial*, [http://12.14.235.104/search4:chace:u2 mill my 6 cm8,](http://12.14.235.104/search4:chace:u2%20mill%20my%206%20cm8,) www.bappenas.go.id

Namun demikian, khusus PKPS-BBM yang diwujudkan dalam bentuk BLT, banyak pihak yang melihat adanya manfaat yang kurang bisa didapatkan. Pemberian BLT dipandang kurang mendidik apabila masih banyak penyimpangan-penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran. Ada yang tidak menerima penuh karena dibagikan ke yang lainnya. Alangkah baiknya program itu diberikan dalam bentuk ekonomi produktif seperti padat karya. Pemberian uang semacam SLT/BLT justru akan menjadikan masyarakat manja, tidak mau bekerja keras dan mendapatkan uang secara gampang.⁹

Negara Islam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya tanpa memperdulikan kasta, kepercayaan atau pun warna kulitnya. Semasa pemerintahan khalifah, semua orang yang miskin dan kekurangan yang non Islam diberikan bantuan dari baitul mal untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Secara hukum dan moral negara bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Jika terjadi sebagian masyarakatnya yang menderita kelaparan atau kekurangan bahan pokoknya, maka ia harus diberikan bantuan. Jika tidak berarti negara gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Namun demikian dapat ditegaskan bahwa negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, negara hanya

⁹ Dikutip dari Buletin Batang Berkembang, *op.cit.*, hal. 6.

bertanggungjawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu. Apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok dengan usahanya sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti apapun, negara tidak boleh dengan seluruh tanggung jawab utuh menyediakan makanan, pakaian dan perumahan bagi segenap masyarakatnya. Karena hal demikian mendorong manusia semakin bernaafsu akan kebendaan dan kelemahan moral.¹⁰

C. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman Kudus

Pengurangan subsidi BBM diyakini telah memicu kenaikan jumlah penduduk miskin sebelum setahun terakhir. Dengan membuat upah riil dan daya beli masyarakat menurun secara tepat. Pemerintah bukan tidak menyadari itu, tetapi sangat percaya bahwa pemberian dana kompensasi atas pengurangan subsidi BBM dalam bentuk BLT akan mampu mempertahankan daya beli masyarakat. BLT yang ditujukan pada 19,2 juta keluarga miskin dan dekat miskin pada tingkat tertentu, memang mampu memperbaiki daya beli masyarakat. Namun upaya tersebut belum memadai untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.¹¹

Program kompensasi pengurangan subsidi BBM (PKPS-BBM) yang telah diluncurkan pemerintah pada tahun anggaran 2005 berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yang mana bantuan tersebut secara serempak

¹⁰ Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid I, Seri Ekonomi Islam No. 3, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 140.

¹¹ Di kutip dari koran *KOMPAS* pada tanggal 13 September 2006 hal. 6.

diberikan kepada masyarakat keluarga miskin di seluruh Indonesia khususnya di Desa Kauman Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Bantuan atau Subsidi Langsung Tunai disalurkan pertama kali mulai 1 Oktober 2005, dalam pelaksanaannya kantor pos akan mengumumkan jadwal pengambilan BLT lebih lanjut.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Kauman sudah berjalan sebanyak 4 kali periode. Dengan jadwal sebagai berikut:

- a). Periode I : tanggal 13 oktober 2005
- b). Periode II : tanggal 8 februari 2006
- c). Periode III : tanggal 12 juni 2006
- d). Periode IV : tanggal 7 oktober 2006¹²

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di desa Kauman cukup tertib, aman dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme mulai dari pendataan kepada rumah tangga miskin sampai pada penentuan rumah tangga miskin dan pelaksanaannya. Adapun pelaksanaannya dapat dilihat dari berbagai tahapan berikut ini.

1. Pendataan

Proses pendataan rumah tangga miskin di desa Kauman, dilakukan oleh kepala desa setempat dengan dibantu tim pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Kauman. Sedangkan waktu pendataannya menunggu adanya pemberitahuan dari petugas badan statistik kabupaten Kudus. Setelah badan statistik memberi tahu dengan

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kauman, Bpk. Nasruddin, pada tanggal 3 desember 2006.

cara datang langsung ke desa Kauman, selanjutnya oleh kepala desa Kauman beserta tim PKPS-BBM desa Kauman melakukan pendataan yang bertujuan untuk memperoleh nama dan alamat rumah tangga miskin sebagai sasaran dari penerima Bantuan Langsung Tunai. Pendataan di desa Kauman dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2005.

Setelah kepala desa Kauman mendata siapa saja rumah tangga miskin di desa Kauman, selanjutnya hasil pendataan diberikan kepada badan statistik kabupaten Kudus untuk bahan pengecekan lebih lanjut. Dengan daftar nama dan alamat rumah tangga miskin yang di kirim oleh kepala desa Kauman, selanjutnya oleh tim dari badan statistik melakukan penelitian ulang dan pencocokan nama dan alamat serta sekaligus memastikan validitas rumah tangga calon penerima BLT. Pencocokan dilakukan dengan cara mendatangi langsung (*door to door*) ke rumah warga oleh tim dari badan statistik Kabupaten Kudus. Apabila dalam pencocokan dan penelitian ulang pada rumah tangga yang kondisinya sesuai dengan tujuan pendataan, maka ia ditetapkan berhak menerima kartu kompensasi BBM sebagai bukti pengambilan BLT. Dan apabila tidak sesuai dengan kondisinya maka ia dicoret dan tidak berhak menerima BLT.

2. Verifikasi data

Bahwasanya pendataan penerima dana BLT di desa Kauman tidak dibatasi sampai berapa orang yang menerima BLT. Selagi orang tersebut termasuk rumah tangga miskin maka ia berhak memperolehnya. Setelah melalui tahapan pencocokan atau pendataan ulang oleh badan statistik,

penerima BLT di desa Kauman mengalami perubahan yang semula berjumlah 11 rumah tangga menjadi 8 rumah tangga.

3. Penentuan

Setelah mengalami perubahan jumlah rumah tangga yang akan menerima KKB oleh tim dari badan statistik menentukan hanya 8 dari 11 rumah tangga yang menerima. Hal ini disebabkan karena rumah tangga tersebut tidak layak di sebut miskin. Penentuan rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT berdasarkan pada kriteria rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.¹³

4. Pendistribusian

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan di Desa Kauman telah berjalan sebanyak 4 (empat) kali putaran. Jumlah nominal nilai BLT yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin pemegang kartu Kompensasi BBM (KKB) di Desa Kauman akan menerima uang sejumlah Rp. 100.000 per bulan. Untuk memudahkan pengambilan BLT akan diberikan setiap tiga bulan, masing-masing Rp. 300.000,- Yang pada kenyataannya diperoleh secara utuh sejumlah Rp. 300.000,- tanpa ada pemotongan-pemotongan biaya termasuk untuk administrasi atau alasan pembangunan desa. Karena menurut kepala desa Kauman, dana tersebut memang Bantuan Langsung Tunai yang di berikan kepada masyarakat keluarga miskin atau tidak mampu sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

¹³ Hasil wawancara dengan Tim PKPS-BBM desa Kauman, Bpk. Fatchan, pada tanggal 7 Desember 2006

Sedangkan kriteria atau ciri-ciri keluarga miskin yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai dan pemegang KKB di desa Kauman pada kenyataannya tidak seperti yang dijelaskan dan diterangkan pada ketentuan pemerintah. Tetapi kriteria rumah tangga miskin yang menerima BLT di Desa Kauman mempunyai kriteria khusus yaitu keluarga miskin yang kurang mampu yang tidak memiliki mata pencaharian dan sudah lanjut usia. Dalam hal ini kepala desa beserta perangkat desa lainnya telah melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada sebagian warga desa Kauman sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecemburuan antar warga lainnya yang tidak mendapat BLT.

Adapun keluarga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman sebanyak 8 KK pada 1 RW diantaranya:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Keluarga Syafi'i | Warga Rt 03 |
| 2. Keluarga Sulastri | Warga Rt 03 |
| 3. Keluarga Zahro | Warga Rt 03 |
| 4. Keluarga Masrukan | Warga Rt 02 |
| 5. Keluarga Djuaini | Warga Rt 02 |
| 6. Keluarga Maschozan | Warga Rt 02 |
| 7. Keluarga Sulichah | Warga Rt 01 |
| 8. Keluarga Anisah | Warga Rt 01 |

Berbeda dengan daerah-daerah lain, pemberian kartu KKB sebagai syarat pengambilan BLT di desa Kauman tidak begitu menimbulkan banyak gejolak, karena sebelumnya telah ada kesepakatan antar warga. Dan dalam

pendekatan penduduk yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai dianggap tepat pada orangnya dan tidak salah sasaran.¹⁴ Walaupun sebagian warga yang tidak terima dengan pendataan KKB di desa Kauman karena sebagian penduduk mengundang ketidakpuasan dan mengaku berhak mendapatkan tetapi tidak terdaftar, seperti adanya orang yang tergolong kaya terdaftar sebagai penerima BLT.

Kepala desa Kauman juga menyarankan apabila warga yang merasa dirinya mempunyai hak untuk menerima BLT tapi belum terdaftar, agar secepatnya menghubungi perangkat desa agar didata ulang oleh BPS. Tim unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKPS BBM desa Kauman Fika Rahmawati menyatakan pihaknya menampung pengaduan masyarakat yang belum terdaftar, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan BPS, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengadu.

Perlu diketahui bahwa uang BLT dapat diambil di kantor pos terdekat, dan untuk daerah yang sulit terjangkau, kantor pos akan mengantarkan BLT dengan tempat dan jadwal yang akan diumumkan kemudian. Di desa Kauman keluarga miskin langsung dapat mengambil BLT di kantor pos setelah ada pemberitahuan dari kepala desa secara *door to door*, begitu juga dengan kepala desa menunggu instruksi dari BPS kabupaten Kudus. Pada waktu pengambilan uang BLT diharuskan membawa kartu kompensasi BBM dan menunjukkannya kepada petugas kantor pos selanjutnya petugas akan mencocokkan data-data di kartu kompensasi BBM. Setelah itu memberikan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kauman bapak Nasrudin pada tanggal 26 November 2006.

uang subsidinya dan menarik kupon pembayaran untuk bukti pengambilan uang BLT, terdapat 4 kupon dalam KKB untuk mengambil BLT.¹⁵

Pengambilan BLT tidak boleh dilakukan secara berkelompok, seperti satu orang melakukan pengambilan BLT untuk beberapa anggota warga di RT/dusunnya, kecuali semuanya diwakilkan oleh kepala desa yang selanjutnya pengambilannya di Balai Desa. Masyarakat penerima BLT dianjurkan untuk tidak mewakilkan pengambilan BLT pada orang lain. Ini perlu diperhatikan agar pihak lain tidak meminta biaya tambahan sebagai jasa pengambilan BLT. Dengan demikian pemilik KKB dapat menikmati jumlah BLT secara utuh.¹⁶

Adapun keluarga miskin di desa Kauman apabila pengambilan BLT akan diwakilkan kepada keluarganya, itupun harus izin dan minta surat keterangan yang ditanda tangani oleh kepala desa dengan dilampiri foto copy KTP agar tidak terjadi kesalahan oleh pegawai kantor pos.

Sosialisasi yang dilakukan di desa Kauman dalam penyebarluasan kebijakan dan rencana program pemerintah kepada kelompok sasaran dari program BLT (masyarakat miskin) sangat menentukan kelancaran pelaksanaan BLT termasuk distribusi KKB di desa Kauman, dengan cara tim dari unit pengaduan masyarakat dan pemantauan BLT PKPS-BBM Desa Kauman memberikan secara langsung (*door to door*) ke rumah warga miskin. Hal ini dikarenakan sedikitnya keluarga miskin yang menerima BLT sehingga tidak terlalu sulit untuk datang satu persatu ke setiap rumah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kauman Fika Rahmawati pada tanggal 30 November 2006.

¹⁶ Dikutip dari Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program BLT, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.

warga Desa Kauman yang miskin untuk diberitahu dan memudahkan dalam pemahaman tentang BLT.

Jauh sebelum peluncuran PKPS-BBM disosialisasikan oleh tim sosialisasi PKPS-BBM dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, selanjutnya kecamatan melakukan sosialisasi sampai tingkat desa. Sosialisasi ditingkat kabupaten diikuti oleh tokoh masyarakat, anggota DPRD dan perwakilan kecamatan. Ditingkat kecamatan, pesertanya adalah perwakilan tingkat desa. Tim yang menangani itu bernama tim sosialisasi PKPS-BBM.

Ada sedikit kendala yang dihadapi di desa Kauman ketika pengambilan BLT yaitu kurang tepatnya waktu pemberitahuan tentang keluarnya uang BLT oleh pegawai atau tim PKPS-BBM dari BPS Kabupaten kota Kudus.

Kepala desa Kauman juga mengingatkan kepada warga yang menerima BLT agar menjaga dan menyimpan KKB dengan baik, karena kartu ini hanya diberikan satu kali. Untuk itu kehilangan kartu adalah tanggungjawab setiap pemilik KKB, jika KKB hilang pemerintah tidak akan memberikan penggantinya. KKB harus selalu dibawa waktu mengambil uang subsidi, dan yang boleh mengambil uang subsidi hanyalah orang yang namanya ditulis di KKB.

D. Beberapa Tanggapan Tentang Bantuan Langsung Tunai

1. Kepala Desa Kauman

Menurut Bp. Moch. Nasrudin selaku kepala Desa Kauman berpendapat bahwa dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh rumah tangga miskin, bisa sedikit meringankan beban penderitaan rakyat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi tidak seluruhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Kauman. Hal ini dikarenakan adanya manfaat yang kurang bisa didapatkan.

BLT tidak mendidik sama sekali, apabila masih banyak penyimpangan-penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran sebagai contoh yang terjadi di desa lain, ada yang tidak menerima penuh karena dibagikan ke yang lainnya. Alangkah baiknya program itu diberikan dalam bentuk ekonomi produktif seperti padat karya, disisi lain ia bekerja kemudian ada hasil yang bisa dinikmati.¹⁷

2. Anggota BPD

Sedangkan menurut Bp. Moch. Fatchan, sebagai anggota BPD Desa Kauman, beliau memberikan dukungan untuk BLT. Ia memandang pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai sudah cukup baik untuk membantu masyarakat yang dilanda kesusahan akibat imbas naiknya harga BBM. Ia juga mengatakan bahwa perihal ketidaktepatan sasaran itu banyak pihak menyayangkan kinerja BPS yang kurang melibatkan para Rt-Rt. Sebenarnya dengan era otonomi daerah ini, semua

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kauman bapak Nasrudin pada tanggal 01 Desember 2006.

diserahkan kepada masyarakat. Seperti BLT, saat pendataan pun BPS sudah berusaha melibatkan masyarakat misalnya melibatkan Rt dan Rw dan kepala desa.¹⁸

3. Rumah tangga miskin Penerima BLT

Diantara 8 keluarga miskin yang menerima BLT di desa Kauman, penulis hanya bertanya kepada salah satu orang saja, yaitu Ibu Zahro beliau salah seorang warga desa Kauman Rt. 03. Menurutnya, sebenarnya ia tidak begitu tahu dan peduli tentang Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepadanya. Ia hanya mengetahui bahwa BLT adalah sejumlah uang sebesar Rp. 300 ribu yang diberikan kepada warga desa Kauman yang dianggap miskin. Menurutnya, meskipun sudah menerima BLT, bantuan tersebut belum bisa dijadikan pegangan hidup, karena uang 300 ribu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 3 bulan. Meskipun dapat uang 300 ribu tapi tetap saja harga-harga kebutuhan pokok masih saja naik.¹⁹

4. Masyarakat Lain

Selain melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Kauman yang tidak bersangkutan yaitu bapak Mustofa. Beliau mengatakan bahwa

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak. Moch. Fatchan Anggota BPD pada tanggal 26 November 2006.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Zahroh penerima BLT di Desa Kauman Menara pada tanggal 26 November 2006.

pemerintah dalam kebijakannya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberi bantuan berupa uang tunai kepada orang yang tidak mampu sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM bisa dikatakan cukup efektif, karena bisa meringankan penderitaan orang miskin, asal uang tersebut benar-benar diberikan kepada orang yang berhak.

Menurutnya, pelaksanaan BLT di Desa Kauman tidak begitu ramai karena proses pelaksanaannya hanya diurus oleh aparat desa. Pelaksanaan BLT di Desa Kauman kurang transparan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dari warga Desa Kauman yang tidak mengetahui pelaksanaan BLT tersebut, misalnya saja pada saat proses pendataan rumah tangga miskin. Setahu saya pendataan kriteria rumah tangga miskin yang digunakan di Desa Kauman tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Entah apa alasannya saya kurang faham. Meskipun demikian, warga Desa Kauman tidak sampai terjadi kecemburuan diantara warga.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP KRITERIA MISKIN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kauman Kudus

Ada beragam ketentuan dan batasan yang digunakan untuk menjelaskan istilah miskin, masing-masing orang, kelompok masyarakat, maupun bangsa memiliki ketentuan dan batasan yang berbeda-beda, hal ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi, sosial, budaya maupun pola pikir masyarakat tertentu.

Bahwasanya suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan memang tidaklah mudah, karena pada tiap lingkungan dan kurun waktu memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda-beda. Sehingga bisa terjadi seseorang yang di dalam suatu lingkungan masyarakatnya tertentu sudah digolongkan kaya, namun di lingkungan masyarakat lain ia masih termasuk golongan miskin. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang dianggap miskin dalam suatu masyarakat bila dibandingkan dengan masyarakat lain ia termasuk dalam golongan orang kaya, sehingga di lingkungan tiap masyarakat kedua unsur tersebut, si miskin dan si kaya akan tetap selalu ada. Maka berdasarkan gambaran di atas, kaya dan miskin itu

relatif adanya.¹

Namun pada prinsipnya ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk mengkategorikan seseorang ke dalam kelompok kaya atau miskin yaitu; harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat; mata pencaharian (pekerjaan) yang tetap yang dibenarkan oleh hukum dan kecukupan akan kebutuhan pokok. Sehingga dapat dirumuskan bahwa barang siapa yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap namun hanya menutupi setengah atau lebih dari kebutuhan pokoknya maka ia masih dikategorikan dalam kelompok miskin. Misalnya, sebagai indeks kebutuhan pokok ditetapkan angka 10, maka seseorang yang mempunyai atau memperoleh penghasilan 5-9 dia termasuk golongan miskin. Dengan kata lain miskin adalah orang yang pendapatnya lebih dari 50%, tapi kurang dari 100% dari total kebutuhan hidupnya.²

Atas dasar faktor-faktor di atas dapat dikatakan bahwa pengkategorian kemiskinan seseorang sangat bergantung pada seberapa jauh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya ataupun orang yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, karena kebutuhan tersebut sangat penting guna kelangsungan hidup.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1995, hal. 170

² *Ibid*, hal. 171

kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin.³

Orang yang penghasilannya masih berada di bawah tingkat kebutuhan hidup minimum, nasib mereka tidak seberapa berbeda bila dibandingkan dengan para tuna karya. Golongan manusia dengan penghasilan yang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum itu selanjutnya disebut miskin. Kebutuhan hidup minimum merupakan batas terendah biaya pengeluaran konsumtif untuk dapat disebut hidup layak yang berlaku bagi satu jiwa dalam setiap bulan pada kawasan daerah atau propinsi tertentu.

Untuk membantu pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Tunai, pemerintah membuat kriteria, ciri-ciri atau batasan rumah tangga miskin yang berhak mendapat dana kompensasi BBM dengan Instruksi Presiden RI no12 th 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai, dijelaskan bahwa rumah tangga miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama dengan orang lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

³.Mudrajat Kuncoro, M. Soc. SC., *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, UPP-YKPN, Jogjakarta, 2000, hal. 103.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu –dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah./tidak tamat SD/ sampai SD
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan/ pekerjaan lainnya di bawah Rp 600.000 per bulan
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor/ barang modal lainnya.⁴

Bila dikaji secara eksplisit, Islam tidak membahas dengan tegas kelompok yang masuk dalam kategori miskin maupun kaya, juga tidak membicarakan kriteria-kriteria yang menyebabkan orang masuk dalam golongan kaya atau miskin, namun jika kita mau lebih cermat akan kita temukan adanya hak-hak dan kewajiban, baik dalam perekonomian maupun

⁴ Distribusi kartu kompensasi BBM, http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres%202005/ip%2012-2005.

dalam hal ibadah yang dapat membedakan antara golongan kaya dan miskin.

Memang bila kita perhatikan ayat maupun hadits, serta atsar sahabat bahkan pendapat-pendapat yang ada, kiranya tidak mudah untuk menentukan kriteria yang pasti mengenai miskin, kecuali kata kecukupan. Dengan berdasarkan ketentuan demikian, maka orang-orang yang tidak dapat memenuhi keperluan hidup minimum menurut ukuran yang wajar setiap harinya dapat dikategorikan miskin,

Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan al Qur'an untuk kedua istilah tersebut, para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan.

Al-Qur'an dan hadist tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti, al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu.

Sedang dalam teoritisi hukum Islam (Fuqaha) pada umumnya membedakan antara fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya mereka telah dianggap satu kata yang menunjuk pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaannya memang tidak prinsipil, melainkan lebih bersifat gradual. Fakir menunjuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sementara miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir, akan tetapi ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.

Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sesuai dengan pandangan masyarakat ketika itu, umumnya Fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal; sandang, pangan dan papan, namun untuk konteks sekarang ini konsep kebutuhan pokok seperti itu, jelas perlu penyesuaian, bukan saja kuantitasnya tapi tidak kalah penting adalah kualitasnya. Sehingga, pada saat ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan wajar itu meliputi:

- a. Pangan, dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b. Sandang, yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- c. Papan, yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d. Kesehatan, yang dapat memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang di derita.
- e. Pendidikan, yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan potensi dasarnya selaku manusia.⁵

Sedang kriteria miskin yang diungkapkan oleh ahli sosiologi Sayogyo menetapkan bahwa angka pendapatan atau pengeluaran yang setara 240 kg beras, untuk daerah desa dan 480 kg beras untuk daerah kota atau kriteria rata-

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991, hal. 149

rata 360 kg beras perorang pertahun. Dengan kriteria seperti itu golongan miskin dapat dibagi menjadi sangat miskin, miskin, hampir cukup dan cukup.⁶

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kauman Kudus

Banyak kita jumpai di dalam al-Qur'an ayat yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup orang-orang yang miskin dan yang kekurangan di dalam masyarakat. Apabila tidak cukup maka negara berhak memungut pajak dari orang-orang kaya.

Sebagai mana firman Allah

﴿17﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿18﴾

Artinya: *Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. (Q.S. Al-Fajr 17-18)*⁷

Ayat di atas menunjukkan pentingnya jaminan sosial di dalam masyarakat Islam dan mencela golongan yang merampas hak-hak orang miskin dan lemah. Islam telah mengambil setiap langkah yang mungkin untuk membantu orang miskin. Dan memperingatkan kepada orang yang berharta bahwa tindakan membeda-bedakan dan tidak adil kepada orang miskin akan mendatangkan murka Allah dan akan memusnahkan diri dan harta mereka.⁸

Para sahabat berpendapat bahwa menjadi kewajiban setiap orang untuk membantu anggota masyarakat, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena

⁶ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999, hal. 439

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit* hal 1056

⁸ Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1995, hal. 158

demikian berhaklah tiap-tiap warga Islam memperoleh bantuan dari kas negara (baitul mal) untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dibawah tanggung jawabnya selama ia tidak mempunyai pekerjaan atau selama usahanya tidak memberikan kecukupan. Negara menyediakan dana bagi orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari kelebihan harta orang-orang yang mampu, sehingga tak seorangpun dibiarkan dalam keadaan kelaparan, tidak berpakaian atau tidak bertempat tinggal.⁹

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM, kepada penduduk miskin yang diperkirakan terkena dampak langsung dari kenaikan BBM dan juga merupakan suatu bantuan cuma-cuma untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan atau tingkat pendidikan tertentu.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk keluarga miskin rawan terhadap penyelewengan, mulai dari pendataan, jual beli kartu kompensasi BBM hingga pendistribusian subsidi yang membebani bahkan salah sasaran. Sejak BLT dikeluarkan bagi keluarga miskin, terdapat orang-orang yang tidak merasa malu mengaku miskin hanya karena ingin mendapat BLT, karena di saat harga BBM naik, uang Rp 300 ribu sangatlah berarti. Agaknya pemerintah telah mewaspadai hal itu, dengan naiknya harga BBM, maka tentunya akan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan dasar.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis berusaha untuk menganalisis

⁹ Teungku Muh. Hasby Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hal. 101

pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan di desa Kauman, mulai dari kriteria miskin yang dijadikan standar pelaksanaan, pendataan sampai pada proses pendistribusian kepada warga.

Berdasarkan pada pengamatan kami, pada dasarnya pelaksanaan program BLT di desa Kauman berjalan cukup lancar, aman, dan tertib, tidak seperti yang kita jumpai pada beberapa daerah lain yang sempat menimbulkan kekacauan, kecemburuan bahkan perselisihan antara warga, karena telah adanya koordinasi yang cukup baik antara petugas pendataan dan aparat kelurahan/ desa Kauman.

Proses pendataan rumah tangga miskin di desa Kauman dilakukan oleh tim PKPS-BBM Desa Kauman, Tim PKPS-BBM sengaja dibentuk untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan program BLT dari pendataan sampai pada proses pencairan dana. Adanya tim PKPS-BBM ini dapat meredakan terjadinya masalah atau gejolak yang timbul, karena pada umumnya permasalahan timbul pada saat pendataan KKB. Penduduk yang berhak menerima BLT dianggap banyak yang tidak tepat sasaran, seperti adanya orang yang tergolong kaya atau yang sudah mampu terdaftar sebagai penerima BLT.

Sebenarnya proses pendataan di desa Kauman sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah, meski pada saat pendataan ulang terjadi sedikit perubahan jumlah penerima BLT, dengan alasan salah pendataan. Karena setelah diteliti ulang oleh badan statistik ada yang seharusnya tidak berhak menerima BLT karena tidak dianggap miskin tapi ia

menerima, yang pada akhirnya dicoret dari daftar calon penerima BLT. Akan tetapi hal ini tidak sampai terjadi kekacauan, mengingat calon penerima BLT di desa Kauman hanya beberapa orang saja, sehingga memudahkan bagi tim PKPS-BBM untuk mendata ulang.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya proses penerimaan BLT hampir di seluruh Indonesia mengundang ketidakpuasan bagi sebagian penduduk yang mengaku berhak mendapatkan tetapi tidak terdaftar. Meski cukup banyak aparat desa yang ikut terlibat dalam pendataan rumah tangga miskin dengan harapan dapat meminimalisir munculnya kecemburuan sosial antara warga yang menerima BLT dan yang tidak menerima. Karena bisa dikatakan bahwa sebenarnya pangkal persoalan yang sering menimbulkan gejolak di masyarakat adalah pada pendataan warga yang berhak menerima dengan berbagai kriteria dan syaratnya, belum lagi adanya kepentingan-kepentingan segelintir orang yang hendak mementingkan diri sendiri.

Bila kita mengacu pada peraturan pemerintah yakni Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai, maka akan kita temukan kegagalan pada proses pelaksanaannya, yaitu pada kriteria miskin yang dijadikan patokan pelaksanaan.

Mengacu pada Inpres No. 12 Tahun 2005, orang miskin adalah mereka yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak baik dari ukuran yang sempit, bahan bangunan yang jelek atau penerangan belum listrik juga pemenuhan kebutuhan pokok yang masih di bawah standar misal mengkonsumsi daging/susu/ayam sekali lebih dari seminggu, makan sehari kurang dari tiga

kali, namun dalam pelaksanaannya yang mendapat BLT di Desa Kauman tidak sesuai dengan kriteria tersebut, melainkan dengan menggunakan kriteria tersendiri yaitu seseorang yang dalam hidupnya tidak mempunyai mata pencaharian (pekerjaan yang layak) dan orang yang telah lanjut usia, mereka tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Oleh sebab itu maka warga Desa Kauman yang mempunyai kriteria atau ciri-ciri seperti di atas, ia berhak mendapatkan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan penjelasan di atas, kriteria Rumah tangga miskin yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman tidak sama dengan yang dijelaskan dalam ketentuan pemerintah yakni Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005). Hal ini tidak dapat diterapkan di Desa Kauman, dikarenakan kondisi dan situasi penduduk rumah tangga Desa Kauman tidak ada yang memiliki kriteria atau ciri-ciri seperti dalam ketentuan pemerintah yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2005. Walaupun ada itupun dapat ditutupi dengan kondisi lainnya, misalnya ada rumah tangga yang mempunyai salah satu kriteria sebagaimana Inpres RI No. 12 tahun 2005 yaitu, ia mempunyai tempat tinggal terbuat dari kayu berkualitas rendah dan hanya mengkonsumsi daging/ susu hanya satu kali dalam seminggu, akan tetapi orang tersebut mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya bahkan mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Oleh karena itu pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

di Desa Kauman belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah dan tata kerja distribusi Kartu Kompensasi BBM yang telah diterangkan pada ketentuan pemerintah setempat. Yang mana secara berjenjang dari pusat ke propinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan. Pendataan telah dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi penyelewengan/ salah sasaran walaupun indikator dan kriteria rumah tangga miskin sudah jelas. Memang sangat berat menentukan batasan antara seseorang yang menerima dan tidak menerima BLT. Misalkan saja, taruhlah yang mendapat Cuma 10. nah, rangking 10 dan 11 itu bedanya tipis sekali.

Mengenai jumlah nominal bantuan langsung tunai yang diterima oleh rumah tangga miskin di desa Kauman sebesar jumlah aslinya yaitu Rp 300.000,- maksudnya BLT diberikan secara utuh tanpa adanya pemotongan-pemotongan, termasuk untuk administrasi atau alasan pembangunan keperluan desa. Hal ini dikarenakan dana itu memang Bantuan Langsung Tunai yang diberikan khusus kepada masyarakat tidak mampu. Pada saat BLT diberikan di Desa Kauman tidak sampai terjadi kekisruhan seperti halnya di daerah lain.

Dengan analisis di atas penulis, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Kauman, yang berupa uang tunai sudah cukup lancar dan baik, namun memang belum bisa dikatakan sesuai sepenuhnya dengan petunjuk yang telah digariskan oleh pemerintah, dikarenakan kriteria miskin yang digunakan berbeda dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dengan begitu penulis kurang setuju dengan apa yang telah dilakukan di desa Kauman berkenaan dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena kami menganggap tidak tepat sasaran, meski mereka yang telah mendapatkan adalah warga miskin setempat namun bila dibandingkan dengan standar kehidupan rakyat indonesia pada umumnya atau daerah sebelah mereka sudah tergolong mampu. Seperti yang kami jumpai penduduk dengan rumah yang berkeramik, serta punya motor tetapi karena saudaranya kepala desa, maka ia mendapat BLT.

Oleh karena itu, semua kelebihan harta harus diserahkan kepada negara serta pengelolaannya agar memberi manfaat pada orang miskin dalam masyarakat. Rasulullah SAW mewajibkan kepada negara untuk mengawasi bahwa tak seorangpun dari rakyatnya mengalami kekurangan untuk memperoleh kebutuhan pokok minuman. Karena negara bertanggung jawab untuk membantu menghapuskan kemiskinan dan melindungi hak seluruh masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah tentang kriteria miskin dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang ada di desa Kauman, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam seseorang dianggap miskin apabila mempunyai harta benda dan pekerjaan tapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan yang layak bagi diri dan keluarganya tanpa bantuan siapapun. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai seberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok, yang meliputi pakaian, makanan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan menurut Inpres No. 12 Tahun 2005, orang miskin adalah mereka yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak baik dari ukuran yang sempit, bahan bangunan yang jelek atau penerangan belum listrik juga pemenuhan kebutuhan pokok yang masih di bawah standar misal mengkonsumsi daging/susu/ayam sekali lebih dari seminggu, makan sehari kurang dari tiga kali.

2. Kriteria rumah tangga miskin yang digunakan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Kauman tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kriteria rumah tangga miskin seperti yang dijelaskan pada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005 tentang

pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak ditemukan pada warga desa Kauman. Sehingga pelaksanaan pemberian BLT di desa Kauman menggunakan kriteria khusus yaitu seseorang yang tidak mempunyai suatu pekerjaan dan telah lanjut usia.

Pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai di desa Kauman berjalan lancar meski belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari proses pendataan sampai pada pelaksanaan pendistribusiannya. Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tersebut, maka perlu adanya sosialisasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang berwenang.

B. Saran-saran

Pemerintah kabupaten kota Kudus dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai khususnya di desa Kauman hendaknya harus benar-benar di perhatikan. Sehingga kemungkinan salah sasaran dapat di minimalkan. Karena Bantuan Langsung Tunai tidak boleh salah sasaran. BLT harus di berikan pada rumah tangga miskin yang benar- benar membutuhkan.

Kriteria rumah tangga miskin di desa Kauman harus benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di buat pemerintah. Jangan sampai proses pemberian Bantuan Langsung Tunai ini mengundang ketidakpuasan bagi sebagian penduduk desa Kauman, yang seharusnya berhak mendapatkannya tetapi tidak terdaftar. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial.

Untuk itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kekisruhan pada saat penerimaan Bantuan Langsung Tunai, maka perlu adanya koordinasi antara petugas pendataan dan aparat kelurahan atau desa. Paling tidak dengan kepala desa agar data yang diperoleh benar-benar valid. Apabila ada warga yang merasa dirinya berhak menerima Bantuan Langsung Tunai akan tetapi belum terdaftar, agar menghubungi aparat desa supaya di data ulang. Dan dapat diupayakan adanya kriteria keluarga miskin, sehingga tidak terdapat perbedaan kriteria maupun jumlah keluarga miskin di antara instansi-instansi pengelola program PKPS – BBM.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada para dosen pembimbing.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, karenanya penulis berterima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif terhadap karya ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga Allah meridhoi amal perbuatan hamba-Nya yang salah. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998.
- Album data Bhabinkamtibmas desa Kauman Kec. Kota Kab. Kudus, Januari 2006
- Al-Fannani, Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ali, Moh. Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cet1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Nawawi, Al-Syekh Muhyidin Abu Zakaria ben Syaraf, *Raudhah Thalibm*, Majmu' Syarh, al-Muhadzdzab, Juz VI, dari Fikr.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet Ke 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqie, Teungku Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.
- _____, *Al-Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- At-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan 'antanwil ay Al-Qur'an*, Jilid 6, Darul Fikr, 1995.
- At-Tukhi, Moh. Sanad, *Ibadah Muamalah: Dalam Tinjauan Fiqh*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Azzuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, cet. 6, 2005.
- Buletin Batang Berkembang, *SLT Subsidi untuk Penduduk Miskin*, edisi 20/th.x/2005.
- Daftar Isian Potensi dan Profil Desa Kauman Kudus, tahun anggaran 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995, hal 900.
- Dikutip dari Tim Koordinasi Pusat pelaksanaan Program SLT kepada Rumah Tangga Miskin, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.

Distribusi kartu kompensasi BBM, [http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres% 20 2005/ip% 2012 – 2005](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk2005/inpres%202005/ip%2012-2005).

Gazalba, Sidi, *Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam*, Cet2, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1985.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta, Kencana, 2006.

Hasan, Moh. Tolkhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantarabora Pres, Cet ke3, 2005.

Kesejahteraan Sosial: Hak Masyarakat dan Kewajiban Negara, [www/transparansi-or.id/kajian/k.sosial-01.htm](http://www.transparansi-or.id/kajian/k.sosial-01.htm)

KOMPAS pada tanggal 13 September 2006.

Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, UPP-YKPN, Jogjakarta, 2000.

Majah, Abu Abdullah Muh bin Yazid al-Gaswini Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Bab Zuhud*, Juz II, Semarang: Toha Putra.

Mas'ud, Muh. Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press, 2005.

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991.

_____, *Menggagas Ulang Zakat*, Bandung, Mizan, 2005.

Moleong, Lexy, *Metode kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet14, 2001.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1996.

Peningkatan perlindungan dan Kesejahteraan sosial, [http://12.14.235.104/search4: chace:u2 mill my 6 cm8,, www.bappenas.go.id](http://12.14.235.104/search4:chace:u2millmy6cm8,,www.bappenas.go.id)

Purnomo, *Dampak Psiko Sosial Bantuan Langsung Tunai*, [http://www.sinarharapan.co.id /berita/ 0601/28/ op101.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/28/op101.html).

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Lintera Antarnusa, cet 6, 2002.

_____, *Hukum Zakat*, Litera Antarnusa, cet. 7, Jakarta, 2004.

_____, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.

- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid I, Seri Ekonomi Islam No. 3, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1995.
- SoekantoSuryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, edisi 1 Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam-Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suyitno dkk., *Anatomi Fiqh Zaka*, Yogakarta; Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program BLT, Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung, Mizan, 1995.